

ABSTRAK

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI DI DESA NEGRI SAKTI KABUPATEN PESAWARAN)

Oleh

SOFIA TRI MULYA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi besar dalam mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa bersama kepala desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa posisi BPD sebenarnya menjadi lebih strategis dengan membangun sistem pemerintahan desa musyawarah desa menjadi forum untuk mengambil keputusan-keputusan strategi dan di peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsinya seperti fungsi legilasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan tetapi anggota BPD sebagai perwakilan masyarakat desa masih memiliki tingkat kapabilitas yang kurang seperti terbatasnya pendidikan, pengalaman, dan kemampuan khusus hal tersebut menyebabkan BPD belum maksimal dalam menjalankan perannya serta kurang memahami tugas pokok dan fungsinya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengetahui dan menganalisis peran apa saja dari Dinas PMDT Provinsi Lampung untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas kemampuan anggota BPD.

Jenis Penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi, Editing, Interpretasi data. Hasil Penelitian, menunjukkan bahwa peranan pemberdayaan masyarakat, desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Meningkatkan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada tiga tahap yaitu peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi, peningkatan kapasitas sistem dalam 3 tahap ini masing-masing berperan untuk membangun kemampuan anggota BPD dalam meningkatkan kapasitas dan sudah berjalan dengan baik namun terdapat faktor penghambat yaitu masih kurangnya sebuah pelatihan dan pemahaman kepada BPD karena minim ruang dalam berdiskusi di masa pandemi sehingga BPD masih kurang paham fungsi dan tupoksinya.

Kata Kunci : *Peranan Dinas Pmdt, Peningkatn kapasitas badan permusyawaratan Desa (BPD)*

ABSTRACT

**THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF VILLAGE COMMUNITY
EMPOWERMENT AND TRANSMIGRATION OF LAMPUNG PROVINCE
IN INCREASING THE CAPACITY OF MEMBERS OF THE VILLAGE
CONSULTANCY AGENCY
(STUDY IN NEGERI SAKTI VILLAGE, PESAWARAN REGENCY)**

By

Sofia Tri Mulya

The Village Consultative Body (BPD) as a partner of the Village Government has a major function in protecting customs, making village regulations with the village head. In Law 6 of 2014 concerning villages, the BPD's position has actually become more strategic by building a village government system into a forum for making decisions by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body to assign a legal number to BPD as an institution in the village that has a function such as the legislative function, budget function, supervisory function but members of the BPD as representatives of the village community still have a low level of capability such as limited education, experience, and special abilities, this causes the BPD to not be optimal in carrying out and lack of understanding of the main tasks and functions. to find out how the role of the Lampung Province Community Empowerment, Village and Transmigration Office in Increasing the Capacity of the Village Consultative Body (BPD), to find out and analyze the roles of the Lampung Province PMDT Office to form and increase capacity BPD members.

The type of research used is qualitative research with data collection methods through observation studies, interviews and documentation, editing, data interpretation. The results of the study show that the role of community, village and transmigration empowerment in Lampung Province in increasing the capacity of members of the Village Consultative Body (BPD) has three stages, namely increasing individual capacity, increasing organizational capacity, increasing system capacity. BPD members in increasing capacity and it has been going well, but there are inhibiting factors, namely the lack of training and understanding for BPD because there is minimal space for discussion during the pandemic so that BPD still does not understand its functions and main tasks.

Keywords: The Role of the Pmdt Office, Capacity Building for the Village Consultative Body (BPD)